



KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pengendara melintasi Jalan Tol Jembatan Suramadu dari arah Surabaya ke Bangkalan di Pulau Madura, Jawa Timur, Rabu (1/3). Mulai 1 Maret 2016, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menurunkan tarif Tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) hingga 50 persen untuk semua golongan kendaraan, sedangkan sepeda motor tidak dikenai biaya.

JEMBATAN SURAMADU

Jumlah Penumpang Kapal Penyelubungan Terus Berkurang

SURABAYA, KOMPAS — Penyelubungan laut Surabaya-Madura di Jawa Timur melalui Pelabuhan Ujung di Surabaya dan Pelabuhan Kamal di Bangkalan, Madura, semakin kehilangan pelanggan. Keberadaan Jembatan Suramadu dengan tarif yang makin murah dan lambannya pembangunan infrastruktur di Madura menjadi penyebab.

Mulai Selasa (1/3), tarif kendaraan roda empat di Tol Jembatan Suramadu turun 50 persen. Tarif untuk mobil pribadi, misalnya, dari Rp 30.000 menjadi Rp 15.000. Kebijakan baru ini memudahkan warga untuk melintas di Suramadu karena tarif kendaraan roda dua sudah digratiskan sejak Juni 2015.

Penurunan tarif Tol Jembatan Suramadu untuk kendaraan roda empat ini merupakan tindak lanjut dari rencana pemerintah pusat untuk mendorong daya saing di Pulau Madura yang dibahas awal Februari. Tingginya tarif tol menjadi penghambat pengembangan ekonomi di pulau itu. Gubernur Jawa Timur Soekarwo lalu mengusulkan untuk digratiskan sekaligus, tetapi usulan itu ditolak.

Menurut Kepala Gerbang Tol Suramadu Suharyono, peningkatan arus kendaraan roda empat diperkirakan terjadi pekan depan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tarif baru. Saat ini, jumlah kendaraan roda empat yang melintas 16.000 unit per hari.

Sebaliknya, dari sisi penyelubungan laut, Manajer Operasional PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyelubungan (ASDP) Cabang Surabaya Wildan Jazuli mengatakan, jumlah penumpang kapal berkurang dari 60.000 orang per hari pada tahun 2008 (sebelum ada Jembatan Suramadu) menjadi 4.000 orang per hari pada Januari-Februari 2016. Jumlah kapal pun dikurangi dari 19 unit pada tahun 2008 menjadi 4 unit pada 2016. "Dari tahun ke tahun kami terus merugi karena harus menutupi biaya operasional," kata Wildan.

Tarif kapal penyelubungan yang dijual lebih rendah daripada harga normal untuk menutupi biaya operasional. Tarif penum-

pang Rp 5.000 (seharusnya Rp 8.000), tarif sepeda motor Rp 7.000 (seharusnya Rp 15.000), dan tarif mobil pribadi Rp 45.000 (seharusnya Rp 100.000). Jika tidak dijual murah, penumpang kapal penyelubungan akan berkurang lebih banyak.

Meski demikian, masih ada pelanggan tetap yang merupakan warga di sekitar Pelabuhan Kamal dan bekerja di Surabaya. Daripada harus memutar jauh untuk mencapai Suramadu, mereka memilih memakai kapal penyelubungan.

Wildan berharap pemerintah dapat memberikan subsidi tarif sehingga mengurangi beban operasional. Selain itu, harus lebih gencar membangun infrastruktur di Madura, terutama sekitar Pelabuhan Kamal, agar ada daya tarik warga menyeberang menggunakan kapal.

Kepala Dinass Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, kapal penyelubungan harus tetap ada. Bahkan, sudah diusulkan perubahan status pelabuhan kepada Kemenhub. (DEN)

Peternak Semakin Kesulitan Cari Pakan

Menteri Pertanian Ingin Integrasikan Sapi dan Hutan

BANDUNG, KOMPAS — Ribuan peternak sapi perah di sentra produksi susu sapi Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, semakin kesulitan mencari rumput karena banyak lahan perbukitan beralih fungsi. Mereka mencari pakan jerami di Subang, 30 kilometer utara Lembang.

Sejumlah peternak di Lembang, Selasa (1/3), mengungkapkan sulitnya mencari pakan rumput berlangsung pada musim hujan sebab kawasan lindung di perbukitan kawasan Bandung utara itu banyak yang beralih menjadi bangunan. "Dua puluh tahun lalu, kami masih bisa mencari rumput di sekitar Lembang, tetapi sekarang kami harus ke Subang. Itu pun bukan rumput, melainkan jerami," ujar Tarya (45), peternak di Desa Langensari.

"Rumput di Lembang semakin sedikit karena kebanyakan lahan digunakan mendirikan bangunan untuk kepentingan wisata," ujar Mirlan (40), peternak lain.

Pemberian pakan dengan jerami itu diakuinya berisiko pada penurunan produksi susu karena sapi kesulitan mencerna jenis tanaman ini. Namun, karena tidak ada rumput, batang tanaman padi terpaksa diberikan ke sapi. Saat diberi makan rumput, ekor sapi bisa menghasilkan rata-

rata-rata 15 liter. Setelah diganti jerami turun rata-rata menjadi 10 liter. Pakan jerami ini juga menyebabkan sapi susah berahi.

Pemberian jerami untuk sapi perah ini dilakukan para peternak di Lembang yang kini berjumlah sekitar 6.000 orang. Setiap hari sekitar 20 angkutan bak terbuka mengangkut jerami dari daerah pertanian Subang ke Lembang. Satu mobil rata-rata bisa membawa 1 ton jerami seharga Rp 400 per kilogram.

Ketersediaan rumput yang terbatas dikhawatirkan berdampak pada penurunan kualitas susu yang dihasilkan sapi sehingga mengancam kelanjutan usaha persusuan ke depan.

Populasi

Minimnya ketersediaan rumput juga akan berpengaruh pada penurunan populasi sapi karena peternak kesulitan mempertahankan ternaknya. Apalagi, jika harga daging sapi sedang tinggi yang membuat peternak tergur-

menjual ternaknya.

Populasi sapi di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU), misalnya, yang terus menurun. Pada tahun 2010 jumlah sapi 22.000 ekor, berkurang menjadi 16.469 ekor pada 2014.

"Sejumlah peternak menjual sapi karena tergiur dengan harga jual daging sapi yang sempat di atas Rp 100.000 per kilogram beberapa waktu lalu," ujar Sekretaris KPSBU Ramdan Sobahi.

Ramdan tak memungkir ketersediaan rumput di Lembang semakin minim. Hal itu tak terlepas dari maraknya alih fungsi lahan sehingga lahan hijau semakin berkurang.

"Selama tidak ada kebijakan yang menjadi solusi kelangkaan rumput, kondisi peternak sapi akan seperti ini terus. Upaya sulit memenuhi kebutuhan susu nasional juga akan sulit diwujudkan," ujar Ramdan.

Pemanfaatan hutan

Terkait pakan sapi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, di Kabupaten Banyumas, Jateng, kemarin, menyatakan, integrasi sistem peternakan melalui pemanfaatan hutan penting dalam pengembangan ternak sapi perah di Indonesia. Konsep pemeliharaan ternak dalam hutan sebagai penyedia pakan hijau diharapkan meningkatkan populasi sapi

sekaligus menekan biaya pakan yang tinggi.

Amran mengatakan hal itu sesuai berkolaborasi ke Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak di Baturaden, Banyumas.

"Intinya, bagaimana hutan bisa berintegrasi dengan ternak sapi. Ini penting agar populasi sapi meningkat, dan biaya pakan yang selama ini jadi beban peternak dapat ditekan," katanya.

Amran menjelaskan, dalam satu hari, satu sapi membutuhkan 50 kilogram rumput. Peternak juga harus melakukan fermentasi dan mencampur pakan dengan jerami untuk memenuhi kebutuhan pakan. Namun, seiring keterbatasan lahan di sentra peternakan rakyat, peternak makin sulit mendapatkan pakan hijau. Minimnya pakan menyebabkan angka bunting sapi rendah.

Dia menegaskan, jika integrasi lahan hutan-sapi berhasil, sapi bisa diprogramkan untuk melahirkan satu kali dalam setahun. Artinya, dalam 12 tahun sapi bisa melahirkan 12 kali.

Kementerian Pertanian, lanjut Amran, akan berkoordinasi dengan Perum Perhutani untuk mencari lahan peternakan. Sedangkan dibutuhkan 10.000 hektar lahan untuk meningkatkan produktivitas daging sapi dan susu. (DMU/TAM/GRE)

PERBATASAN NEGARA

Potensi Perdagangan Belum Tergarap

PONTIANAK, KOMPAS — Daerah perbatasan RI-Malaysia, khususnya di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, memiliki potensi perdagangan antarnegara yang bisa mendatangkan devisa. Namun, potensi itu belum tergarap karena beberapa kendala, antara lain belum adanya regulasi dan fasilitas penunjang.

Suparman, Camat Entikong, Selasa (1/3), mengatakan, daerah perbatasan negara itu memiliki potensi besar bagi peningkatan perekonomian Indonesia melalui perdagangan antarnegara. "Selama ini, perdagangan memang sudah ada, tetapi hanya sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan. Belum dimanfaatkan untuk perdagangan skala besar untuk menambah devisa negara," ujarnya.

Masyarakat perbatasan berpeluang ke Malaysia hanya berda-

sarkan Perjanjian Sosial Ekonomi Indonesia-Malaysia (Sosek Malindo) yang dilaksanakan sejak 1970. Dalam Sosek Malindo terdapat ketentuan, warga perbatasan hanya bisa berbelanja maksimal 600 ringgit atau setara Rp 1,8 juta per orang per bulan di Malaysia.

Potensi perdagangan itu perlu digarap. Apalagi, Indonesia saat ini sudah memasuki babak baru dalam integrasi ekonomi yang dinamakan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Momentum itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perdagangan melalui wilayah Kalimantan Barat. Misalnya, komoditas lada, karet, dan hasil-hasil pertanian hortikultura lainnya.

Suparman mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah provinsi dan pusat agar dibangun pelabuhan darat. Saat ini lahan sudah disiapkan dan tinggal menunggu persetujuan

pemerintah pusat dan pembebasan lahan. Lahan sekitar 5 hektar berada di kawasan pos pemeriksaan lintas batas.

MH Munsin, Kepala Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Kalbar, mengakui, potensi perdagangan di perbatasan belum tergarap. "Saya sudah berulang kali mengusulkan kepada pemerintah pusat agar perdagangan dalam skala besar diberlakukan di perbatasan, tetapi tidak ada kejelasan sampai saat ini," ujar Munsin.

Dengan kondisi seperti itu, akhirnya yang diuntungkan adalah penyelundup. Potensi pendapatan negara justru hilang. Padahal, jika sistem perdagangan-sehingga dikelola dengan baik, itu bisa mendatangkan devisa besar.

Munsin menuturkan, berdasarkan analisis yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kalbar pada 2013, potensi ekspor dari Indonesia ke Malaysia dalam se-

bulan bisa mencapai 179.000 dollar AS. Sebaliknya, impor dari Malaysia lebih rendah, yaitu 80.000 dollar AS per bulan.

Pemprov pun sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dibangun pelabuhan darat sehingga perbatasan siap jadi pusat perdagangan. "Presiden meminta pembangunan pelabuhan darat di kawasan pos lintas batas dengan luas 50 hektar. Padahal, luas kawasan pos lintas batas hanya 5 hektar," katanya.

Munsin berharap pemerintah pusat mengubah cara pandang tentang perbatasan. Dahulu mungkin perbatasan hanya dipandang bukan daerah strategis, tetapi sekarang hendaknya dipandang sebagai daerah strategis sehingga pusat pertumbuhan Indonesia tidak hanya di Jawa saja, tetapi tersebar di sejumlah daerah. "Sayang kalau potensi ini tidak dioptimalkan pengelolaan," ujar Munsin. (ESA)

Waspada Hujan dan Angin



KOMPAS/P. RADITTA MAHENDRA YASA

Mendung mengiringi aktivitas warga di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (1/3). Dalam beberapa hari ini, hujan deras disertai angin kencang mendera sejumlah wilayah di Indonesia sehingga berpotensi menimbulkan bencana banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini adanya hujan deras disertai kilat dan angin kencang.

PEMBANGUNAN DAERAH

Bintan Fokus Membangun Kampung

BINTAN, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, memfokuskan pembangunan pada kampung-kampung. Fokus itu mendorong pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata, dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Bupati Bintan Apri Sujudji, Selasa (1/3), mengatakan, berbagai persoalan ada di permukiman warga. Tanpa membenahi perkembangan atau permukiman, berbagai persoalan itu akan tidak kunjung selesai. "Tak bisa mengatasi kemiskinan kalau kampung-kampung tidak ada kegiatan perekonomian," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Bintan mencatat, 11.800 warga kabupaten itu tergolong miskin. BPS sudah memverifikasi data itu hingga ke pengurus RT tempat warga berdomisili. "Petugas kami menghubungi pengurus lingkungan setempat untuk memverifikasi agar jangan sampai ada data salah. Data ini dipakai sebagai acuan pengentasan rakyat dari kemiskinan," ujar Kepala BPS Bintan Ahmad Dini.

Meskipun jumlahnya hanya setara 8,3 persen dari 141.415 penduduk, Pemkab Bintan tetap menjadikan pengentasan rakyat

dari kemiskinan sebagai salah satu prioritas.

Penduduk yang tergolong miskin tersebar di berbagai penjuru Bintan. Sebagian diketahui berdomisili di sejumlah kampung. "Tahun ini, selain dari anggaran pengentasan rakyat dari kemiskinan, ada juga program-program yang diarahkan dari dinas-dinas," ujar Apri.

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 dikucurkan Rp 24,8 miliar, atau lebih tinggi dibandingkan anggaran tahun lalu senilai Rp 14,3 miliar untuk mendanai pengentasan rakyat dari kemiskinan. Program utamanya adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pemberdayaan usaha warga miskin. "Ada program dan anggaran lain, yang intinya juga untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan menggerakkan perekonomian," kata Apri.

Tahun ini, Pemkab Bintan antara lain fokus membangun jalan penghubung antarkampung. Dampak perekonomian pembangunan jalan itu sudah bisa dirasakan sejak proses pembangunan hingga jalan digunakan.

Dalam proses pembangunan jalan, warga kampung dapat menjadi pekerja. Sementara jika

sudah selesai, jalan akan melancarkan hubungan antarkampung. Aktivitas perekonomian dari kampung ke kampung bisa berjalan. Hasil pertanian, tangkapan nelayan, atau produksi lain di desa lebih mudah didistribusikan.

Apri juga meminta dinas-dinas rutin datang ke kampung. Para kepala dinas dan jajarannya diminta mendata, program pembangunan apa yang dibutuhkan di kampung. Jadi program sesuai dengan kebutuhan nyata warga, hasilnya bisa segera dimanfaatkan warga.

Pembangunan di kampung lanjut Apri, juga bentuk distribusi anggaran secara merata. Pembangunan tidak lagi terpusat di salah satu lokasi saja. "Bisa lebih merata dan dirasakan lebih banyak warga karena memang di jalankan di tempat mereka tinggal. Ini salah satu jalan mewujudkan visi Bintan Gemilang," katanya.

Ia mengemukakan, pembangunan dengan bertumpu di kampung-kampung, dinyatakan sudah teruji di banyak daerah. Strategi itu lebih memberdayakan dan meningkatkan keterampilan warga dalam proses pembangunan. (RAZ)

SATWA LIAR

Konflik Semakin Mengancam Gajah dan Warga

JAMBI, KOMPAS — Konflik gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) di ekosistem Bukit Tigapuluh Tebo, Jambi, dengan masyarakat kian mengkhawatirkan. Selain kerusakan tanaman kebun warga yang kian meluas, ancaman terhadap keselamatan gajah, dan juga warga, pun semakin tinggi.

Dalam dua bulan terakhir, diperkirakan 200 hektar kebun karet dan sawit warga rusak saat kewan gajah melintasi ruang jelajahnya yang melingkupi Kecamatan Sumay hingga VI Kota, Kabupaten Tebo. Jalur pelintasan itu kini meluas oleh pembangunan kebun, jalan, dan permukiman, sehingga membatasi ruang jelajah gajah.

"Di mana gajah melintas, hampir setiap hari kini menimbulkan konflik dengan manusia," ujar Miswandi, peneliti ekosistem Bukit Tigapuluh, di Jambi, Selasa (1/3).

Lambannya penanganan konflik satwa dengan manusia oleh pemerintah daerah meningkatkan ancaman keselamatan, baik di pihak gajah maupun masyarakat setempat. Pertengahan bu-

lan lalu, di tengah memanasnya konflik di Desa Sembau, Kecamatan Sumay, seekor gajah jantan dewasa tewas ditembak dan gadingnya diambil. Kematian gajah bernama Dadang (30) tersebut diyakini terkait erat dengan jaringan perburuan satwa liar.

"Jaringan ini memanfaatkan situasi konflik yang tengah memanas antara gajah dan manusia. Lambannya penanganan menjadi celah ancaman keselamatan di kedua belah pihak," katanya.

Miswandi melanjutkan, konflik gajah dan manusia tersebut semula dipicu pembangunan jalan angkut hasil kayu yang membelah ekosistem Bukit Tigapuluh oleh salah satu perusahaan pemegang konsesi hutan tanaman industri. Pembabatan hutan untuk jalur sepanjang 87 kilometer tersebut tidak hanya mengusik rubah hidup gajah, pembalakan dan perambahan pun kian marak setelah pembangunan jalur angkut kayu selesai pada 2009.

"Ribuan orang berspekulasi memasuki kawasan hutan melalui jalan baru tersebut untuk

mencuri kayu dan membuka kebun-kebun baru di tengah hutan," ujar Miswandi.

Tingkatkan populasi

Dalam program pembangunan nasional jangka menengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memasang target peningkatan populasi 25 spesies satwa dilindungi yang kondisinya terancam punah sebesar 10 persen, termasuk gajah Sumatera.

Dalam dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah, pemerintah menetapkan visi konservasi gajah Indonesia tahun 2007-2017, yakni agar manusia dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan gajah.

Kenyataannya, konflik gajah dengan manusia terus bertambah marak di berbagai wilayah kantong gajah. Dari 56 kantong yang tersebar di 8 provinsi di Sumatera, gajah telah dinyatakan punah pada 13 kantong.

Bersamaan dengan itu, perburuan gading memperparah penyusutan populasi gajah dalam angka yang cukup mencengangkan. Hingga tahun 2007, populasi gajah mencapai sekitar 2.400

ekor, atau susut drastis dari tahun 15 tahun sebelumnya. Dengan target peningkatan populasi, kondisi saat ini bukannya membahayakan. Populasi gajah yang tinggal 1.300 ekor membawa gajah ke dalam status terancam punah.

"Target peningkatan populasi 10 persen adalah target yang ambisius. Tanpa komitmen dan upaya yang seimbang untuk mencapainya, ini sama saja seperti menargetkan diri kita untuk gagal," ujar Wulan Pusparini, peneliti gajah dari Wildlife Conservation Society (WCS).

Terkait kondisi habitat gajah yang terfragmentasi, spesialis satwa kunci dari WWF, Sunarto, mengatakan agar dukungan para pengelola kawasan dan lahan dimaksimalkan. Pemerintah dapat meminjam ulang dan menglokalisasi kawasan yang penting bagi gajah untuk dilindungi dan dikelola secara lebih baik. Selain itu, juga perlu komitmen dan ketegasan pemerintah untuk memastikan setiap pemegang konsesi berkontribusi positif pada upaya konservasi gajah.

(ITA)